

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(LPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUARA BASUNG  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Indriyani**

**NPM : 177110443**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Indriyani  
NPM : 177110443  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan Sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Pembimbing,

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

  
Drs. Syapril Abdullah, M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Indriyani  
NPM : 177110443  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

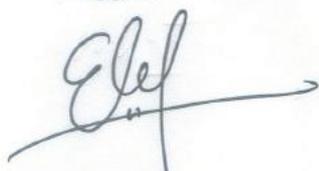
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Pekanbaru, 12 Januari 2022  
Sekretaris

  
Drs. Syapril Abdullah, M.Si.

  
Nurmasari, S.Sos., M.Si.  
Anggota

  
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengretahui,  
Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 06/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Indriyani  
N P M : 177110443  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

**Struktur Tim :**

1. Drs. Syapril Abdullah, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Nurmasari, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 05 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

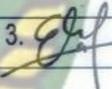
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 06/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 05 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Juamat tanggal, 06 Januari 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Indriyani  
NPM : 177110443  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Nilai Ujian : Angka : "80.66" ; Huruf : "A"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Ketua	1. 
2.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 06 Januari 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Indriyani  
NPM : 177110443  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Ketua

Sekretaris

Drs. Syapril Abdullah, M.Si.

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I  
Publik

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Adapun judul dari skripsi ini adalah berjudul **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”** ini penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membntu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M. CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbing berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
7. Ayahanda tercinta “Yatin” dan ibunda tercinta “Jumiati” yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo’akan, memberikan

inspirasi, mendidik, semangat, dukungan, serta jerih payah kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Untuk Abang Andri Yatno, Kakak Ipar Sri Wahyuni, serta adik yang bernama Ardiansyah serta seluruh keluarga besar dan sepupu-sepupu yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin dan pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
10. Sahabat saya yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan Skripsi yaitu, Nanik Widyawati, S.AP., Nita Sari, S.AP., Fitri Yani Oktavia, S.AP., Rahmatul Rizki, S.AP., Dwi Risda Suryariza, S.AP dan Nurjannah Br. Siregar, S.AP.
11. Teman saya Siti Khodijah, S.AP., Indah Siti Muharammah, S.H., Agus Kurniawan, Eedi Boncell, Fauzi Winanda dan penyemangat saya Diki Suherman yang telah membantu menyelesaikan skripsi dan memberikan masukan serta saran yang membangun.
12. Teman-teman Administrasi Publik kelas A tahun ajaran 2017 yang namanya tidak bisa saya sebutkan semua.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin.....

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 15 Januari 2022

Penulis,

Indriyani



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	18
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>20</b>
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Administrasi.....	20
2. Konsep Organisasi .....	22
3. Konsep Manajemen .....	24
4. Konsep Peranan .....	26
5. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	28

6. Konsep Pembangunan Desa .....	30
B. Kerangka Pikir .....	33
C. Konsep Operasional .....	34
D. Operasionalisasi Variabel .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Informan Dan Key Informan .....	39
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	42
a. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bengkalis.....	42
b. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	44
c. Sosial Budaya.....	49
2. Keadaan Geografi Kecamatan Pinggir.....	49
a. Pemerintahan.....	50
3. Visi dan Misi .....	51
B. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	52
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Identitas Responden .....	56
1. Jenis Kelamin Responden .....	57
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	58

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	59
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	60
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.I :	Operasional Variabel Penelitian Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	37
IV.1 :	Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis .....	47
IV.2 :	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2021 .....	48
V.1 :	Identitas Informan Penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	57
V.2 :	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
V.3 :	Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Usia .....	58
V.4 :	Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian.....	33
IV.3 : Struktur Organisasi LPMD Desa Muara Basung.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	95
2. Daftar Wawancara Kepada Ketua LPMD Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	97
3. Daftar Wawancara Kepada Informan Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	99
4. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	118
5. Daftar Hadir Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Peningkatan dan Peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Tahun 2021 .....	123
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing .....	125
7. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik .....	126
8. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU) .....	127
9. Surat Bukti Penelitian Dari Kantor Desa Muara Basung .....	128
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi .....	129

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indriyani  
NPM : 177110443  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan uang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yan telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2022  
Pelaku Pernyataan,

Indriyani

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUARA BASUNG  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

Indriyani

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dalam pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan mitra kerja pemerintah desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Jenis penelitian ini kualitatif yakni memaparkan data sesuai fakta yang diperoleh apa adanya. Key Informan dalam penelitian ini adalah Ketua LPMD dan yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Wakil Ketua LPMD, Struktur LPMD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil wawancara dianalisis dan dibuat kesimpulannya secara sistematis. Temuan hasil penelitian yaitu dari indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator. Dari analisis data yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya perhatian yang lebih baik lagi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) agar fungsi fasilitator dalam mensosialisasikan, mengajak, dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi bisa lebih baik lagi, diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci: Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

***THE ROLE OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS  
(LPMD) IN VILLAGE DEVELOPMENT IN MUARA BASUNG VILLAGE,  
PINGGIR DISTRICT, BENGKALIS REGENCY***

***ABSTRACT***

Indriyani

A role is a set of behaviors expected of a person according to a given social position, both formally and informally. In village development, the Village Community Empowerment Institution (LPMD) is a partner of the village government. The Village Community Empowerment Institution (LPMD) is very influential on development. This type of research is qualitative, namely describing the data according to the facts obtained as they are. The key informants in this study were the Head of LPMD and the informants were the Village Head, Village Secretary, Deputy Chairperson of LPMD, LPMD Structure, Community Leaders and Youth Leaders. This study uses primary and secondary data collection techniques. The results of the interviews were analyzed and conclusions were drawn systematically. The findings of the research are the indicators of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) as a Facilitator, Mediator, Motivator and Dynamist. From the data analysis that the researchers conducted, it was obtained that the function of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) in village development had not been running optimally. For this reason, there needs to be better attention from the Village Community Empowerment Institution (LPMD) so that the function of the facilitator in socializing, inviting, and inviting the community to participate can be even better, it is also hoped that the community can participate directly in the Village Community Empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). LPMD) Muara Basung Village, Pinggir District, Bengkalis Regency.

*Keywords: The Role of Village Community Empowerment Institutions.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Administrasi sesungguhnya sama tuanya dengan peradaban manusia. Artinya, bahwa kegiatan administrasi sudah ada sejak adanya kerjasama manusia antar manusia itu terjadi. Dalam segi kehidupan manusia, administrasi sangat berhubungan dengan erat yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. Hal ini dalam menjalankan aktivitas kehidupan manusia memerlukan sebuah pelayanan administrative dari sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu hal ini memerlukan manajemen agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sebagai mana mestinya yaitu efektif dan efisien.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, ya itu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan bprakarsa dan swadya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bahwa yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadya

masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Menurut Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme top down yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan dari pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun

wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa menyalagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD.

LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan Nasional tentang keberadaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi PLM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

(Sumber : H. Zainul Efendy, 2001)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengetasan kemiskinan.

Peranan suatu lembaga pada hakekatnya merupakan upaya dalam memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling terkait dalam gerak, langka dan waktu guna pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang dikehendaki bersama. Saat ini aktivitas pembangunan telah mengalami pergerakan kearah yang lebih baik dari segi tatanan kuantitas dan kualitas seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat disegala bidang. Karena itu peranan menduduki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap kegiatan pembangunan secara efisien, efektif dan optimal.

Desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit, dalam pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan sendirinya. Peranan organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Dalam pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintahdesa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sytem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa, Kepala desa yang mempunyai kedudukan

sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Wilayah penelitian ini berada di Desa Muara Basung. Desa Muara Basung merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir. Kecamatan Pinggir yang ibukotanya Pinggir merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera. Secara keseluruhan Kecamatan Pinggir terdiri dari tiga belas (13) desa/kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/kelurahan definitif dimana setiap desa dipimpin oleh kepala desa dan kelurahan dipimpin oleh lurah. Dilihat dari status Pemerintahan Kecamatan Pinggir terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Balai raja dan Titian Antui, dan 11 desa yaitu desa Beringain, Balai Pungut, Melibur, Muara Basung, Kuala Penaso, Pinggir, Semunai, Serai wangi, Tasik Serai, Tenganau, Tasik Serai Timur.

Seperti halnya di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sangat tergantung pada kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik

secara internal maupun secara eksternal. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan Desa baik secara internal maupun secara eksternal.

Sebagai lembaga yang ada ditingkat desa maka LPMD berusaha semaksimal mungkin untuk berperan aktif didalam menjalankan roda pembangunan dan peran serta dalam berbagai bidang yang disusun bersama-sama didesa terutama di Desa Muara Basung, untuk itu dengan adanya peran serta seluruh komponen masyarakat maka pembangunan diberbagai bidang akan dapat terlaksana secara baik.

Kepengurusan LPMD dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan an kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh kepala desa. Susunan Pengurus LPMD ditetapkan terdiri dari ;

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi Keamanan Dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Perlindungan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa
7. Seksi Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Kesenian
8. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan



9. Seksi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Remaja

Adapun tujuan disahkannya LPMD sebagai bagian kegiatan kemasyarakatan adalah :

1. Untuk menyusun rencana penggunaan anggaran Dana desa untuk Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui program pembiayaan yang diberikan pada masing-masing lembaga desa.
3. Sebagai wujud tertib administrasi desa dan syarat-syarat pengelolaan keuangan desa tahun 2018.
4. Sebagai sarana melatih perangkat desa untuk menyusun program pembangunan desa.
5. Sebagai tolok ukur prioritas kegiatan yang sangat perlu dilaksanakan dan logis.

Adapun yang menjadi tugas kerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/LPMD Muara Basung adalah sebagai berikut :

1. Merupakan mitra kerja pemerintah desa yang berbentuk lembaga terpisah dari struktur desa.
2. Membantu pemerintah desa didalam menyusun program-program pembangunan desa.

3. Melakukan koordinasi dengan struktur desa seperti Sekertaris Desa, Kadus, RT dan RW didalam pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Melakukan evaluasi atas program perencanaan pembangunandan melaporkan kepada pemerintah desa secara tertulis.
5. Aktif mengikuti dan melakukan kerjasama dengan semua lembaga desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Muara Basung yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, baik dalam melakukan pembedayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/LPMD Muara Basung adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunya program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Menyiapkan bahan fasilitas pengembangan perekonomian desa;
5. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa dan PKK;
6. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;
9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya;
10. Melaporkan dan mepertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa sesuai standar yang ditetapkan.

Masyarakat di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ini merasa diberdayakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan alasan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menentukan prioritas usulan

program pembangunan. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak menentukan sendiri pembangunan apa yang paling diutamakan atau dibutuhkan di Desa tersebut, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan seperti apa yang dibutuhkan. LPMD juga tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan suatu pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam pembangunan tersebut.

**Tabel 1.1 : Program Pembangunan di Desa Muara Basung Tahun 2018 s/d 2020**

No	Tahun Anggaran	Program	Sumber Dana	Keterangan
1.	2018	Pembangunan jalan pengerasan Pembangunan jalan semenisasi Sumur Bor	APBDesa	Perbub Aset Masih Dalam Proses
	2019	Pembangunan Air Irigasi Pembangunan jalan semenisasi Pembangunan jalan pengerasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Pembangunan Garasi Ambulance Desa Pembangunan Pendopo Kuburan	APBDesa	Perbub Aset Masih Dalam Proses
	2020	Pembangunan Posyandu Pembangunan Los Pasar Basah Pembangunan Air Irigasi Sumur Bor Pembangunan Air Bersih	APBDesa	Perbub Aset Masih Dalam Proses

Sumber : Kantor Kepala Desa Muara Basung, 2018 s/d 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018-2020 masih banyak perencanaan pembangunan yang belum terselesaikan.

**Tabel 1.2 : Realisasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Des Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Program Kerja	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Bidang Keagamaan	Mengadakan wirid Pengajian	Terealisasi
2.	Bidang Pendidikan dan Olahraga	a. Menyediakan Perpustakaan Umum b. Sepak Bola c. Volly	Terealisasi
3.	Bidang Kesehatan	a. Menyelenggarakan Imunisasi bagi balita b. Memberi Makanan Tambahan Pada Anak-anak c. Menimbang Bayi	Terealisasi
4.	Bidang Ekonomi	Mengadakan Koperasi Simpan Pinjam	Terealisasi tapi tidak berjalan lancar
5.	Bidang Keamanan	a. Mengadakan Ronda b. Mengadakan Penjagaan	Terealisasi
6.	Bidang Budaya dan Adat Istiadat	Mengadakan Silat Persahabatan Saat Ada Acara Tertentu	Terealisasi
7.	Bidang Lingkungan	Kebersihan Taman	
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Pertemuan Perempuan Dalam Kematian dan Menggerakkan Warga untuk ta'ziah	Terealisasi

Sumber : Kantor Kepala Desa Muara Basung

Keadaan pembangunan di Desa Muara Basung tersebut sudah lumayan baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dulu keadaan infrastruktur di desa tersebut masih sangat kurang seperti pembangunan jalan umum, dulu keadaan jalan di desa tersebut masih kurang bagus. Sekarang ini infrastrukturnya sudah lumayan bagus. Alasan peneliti kenapa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ini karena kebetulan asal peneliti sendiri dari Desa Muara Basung.

Keadaan suatu desa memang harus terus maju dan meningkat baik dari segi pembangunannya, maka dari itu Strategi LPMD sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan desa. Serta mengerti juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pembangunan. Hubungan LPMD dengan pemerintah desa harus selalu baik begitu juga dengan masyarakatnya agar pembangunan berjalan dengan baik juga. Namun, terkadang masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pembangunan, maka dari itu sangat dibutuhkan strategi ataupun peran dari LPMD dalam menyikapi masalah tersebut agar masyarakat merasa diberdayakan dan akhirnya mau berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tercapai pembangunan desa yang baik.

Berdasarkan pra survei yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. LPMD kurang mensosialisasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. LPMD belum banyak berperan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) dan juga pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Masih kurangnya antusias masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang ada.

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti diterangkan diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**)".

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis juga ikut serta dalam pembangunan Desa. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dari gejala-gejala yang berkembang yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yakni :

**“Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?”**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang ada di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tersebut dalam melakukan pembangunan yang ada Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **1) Secara Teori**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.

**2) Secara Praktis**

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

**3) Secara Akademis**

- a. Secara akademis, sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecah permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

##### 1. Konsep Administrasi

Konsep administrasi yang diidentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini konsep administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketata usahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Keterangan tertulis ini memiliki arti strategi s bagi suatu organisasi. Sebagian besar organisasi di muka bumi ini, nadi aktivitasnya bergantung dari kecukupan dan ketepatan data (keterangan tertulis) yang tersedia. Ketiadaan data yang bernilai informatif berdampak negatif terhadap aktivitas organisasi.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;11) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas

tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara bedaya guna dan berhasil guna.

Ulbert Silalahi (dalam Zulkifli, 2014;11) bahwa administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Harbert A. Simon (dalam Harbani Pasolong 2014;2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Dari batasan administrasi diatas, penulis dapat menyimpulkan tentang administrasi ini tekandung beberapa makna yaitu :

1. Admintsasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak.
2. Admintsitrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seperti waktu, tempat, peralatan, materi dan lain-lain.
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimuali sejak adanya dua orang yang

bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Adapun yang di maksud dalam tulisan ini sebagai berikut : “Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional”.

## 2. Konsep Organisasi

Mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi orang banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerja sama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau

beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry, 2015;14)

Menurut Vesting , et. Al. (dalam Maksudi 2017;39) bahwa organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai bersama.

Sedangkan Massie (dalam Zulkifli 2014;16) Organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota,menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

James D Mooney (dalam Maksudi 2017;39) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Sedangkan menurut Waldo (dalam Zulkifli 2014;16) Organisasi merupakan struktur hubungan anatar pribadi yang berdasarkan atas wewenang formil dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi.

Selanjutnya Stephen P. Robbins (dalam Maksudi 2017;38) Organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Dari penjelasan atau batasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau sistem yang saling mempengaruhi antara satu orang dengan yang lainnya atau orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi juga disebut

sebagai tata hubungan sosial, maka dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi kepada sesamanya pada organisasi tersebut. Organisasi diciptakan sebagai suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada kelangsungan.

### 3. Konsep Manajemen

Stoner, et. Al. (dalam Zulkifli 2014;17) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

George R. Terry (dalam Zulkifli 2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli 2014;18) menurutnya manajemen sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penetapan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu : perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015;12) mendefinisikan bahwa manajemen dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsionalnya administrasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (*organizational goal*)
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (*general and overall policies*)

Selain itu, masih banyak lagi pandangan yang berbeda satu sama lain dikalangan para pakar tentang perumusan fungsi manajemen, di antaranya menurut Harahap menulis fungsi manajemen adalah tugas-tugas yang selalu dilakukan manajer dalam tugasnya. Menurutnya fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning – dcision making*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Kepemimpinan dan motivasi (*leading dan motivating*), dan
4. Pengawasan (*controlling*).

Sementara itu, Terry mengakui dan menerima keragaman fungsi-fungsi manajemen. Keragaman tersebut dilihatnya dari aspek pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut pada lima level (A;B;C;D;E) aktivitas organisasi. Pada level 'a', Terry mengelompokkan fungsi-fungsi dimaksud terdiri dari (dalam Zulkifli 2014;47) :

1. *Planning* (perencanaan),
2. *Organizing* (pengorganisasian),
3. *Actuating* (pemberian dorongan), dan
4. *Controlling* (pengawasan)

Berdasarkan dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen berfungsi untuk mengelola dan memanfaatkan orang lain dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam aktivitas administrasi dalam suatu organisasi tersebut, dengan catatan orang tersebut tidak merasa dirugikan atau terbebani. Untuk menjabarkan secara baik dari setiap fungsi tersebut dalam suatu kerjasama mencapai sasaran organisasi, maka kepada setiap perumus kebijakan dan pelaksanaannya juga dituntut memiliki pengetahuan dan keadilan yang spesifik. Manajemen memiliki peranan yang sangat penting agar pencapaian tujuan suatu aktivitas administrasi yang berlangsung dalam organisasi dapat terwujud secara optimal, efektif dan efisien. Ini berarti bahwa antara administrasi, organisasi, dan manajemen memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat terpisahkan.

#### **4. Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata Peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Peranan menurut Soerjono (2015: 210) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (dalam Soerjono, 2015: 212).

Pengertian peranan menurut Soekanto (2019, 243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peranan normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013: 215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peran-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Sedangkan peranan menurut ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika telah menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan yang telah diembankan, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang sangat diharapkan seseorang berdasarkan fungsi sosial dan statusnya. Peranan apapun yang telah diembankan oleh personal, maka dapat diharapkan mampu ditingkatkan secara maksimal dimana pun baik dari segi organisasi, individu ataupun masyarakat. Seseorang dapat dikatakan telah menjalankan perannya dengan baik apabila ia telah menjalankan hak dan kewajibannya yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari status yang telah disandanya.

#### **5. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ((LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang diberikan fasilitas oleh pemerintah desa dengan melalui musyawarah dan mufakat secara bersama. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan mitra pembantu pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat serta membantu pemerintah desa dalam aspek pengendalian pada masyarakat, perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang partisipatif. Dimana peran LPMD dapat dilihat dari 4 fungsinya dengan mengkaji indikator yang ada di dalamnya, yaitu :

1. LPMD sebagai fasilitator
  - a. Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan
  - b. Masyarakat ikut dalam menentukan prioritas usulan program
2. LPMD sebagai mediator
  - a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan.

- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.
3. LPMD sebagai motivator
  - a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun.
  - b. Masyarakat ikut mereraat pembangunan yang sudah dibuat.
4. LPMD sebagai Dinamisator
  - a. LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.
  - b. LPMD melakukan evaluasi pada program pembangunan.

LPMD merupakan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. LPMD adalah salah satu lembaga atau wadah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tujuan dibentuknya LPMD adalah untuk memandirikan dan mensejahterahkan masyarakat dengan cara terus berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki urgensi tugas dan fungsi dalam pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini sangat tergantung pada kualitas anggotanya agar benar-benar mampu melibatkan diri dalam proses pembangunan desa dan kelurahan. Titik berat dari hal tersebut berada pada anggotanya yang langsung berhadapan dengan masyarakat baik secara hirarki seperti

pada pemerintah desa dan kelurahan maupun aparat fungsional serta organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat dan lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat seperti BPD, PKK, karang taruna dan lain sebagainya.

#### 5. **Konsep Pembangunan Desa**

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Pembangunan Indonesia yang telah direncanakan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang terus dilaksanakan demi perbaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan secara umum bermakna segala proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung alam.

Siagian (2017;4) mendefinisikan bahwa pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Hal ini dapat di tentukan berdasarkan jangka waktu, biaya dan hasil yang diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu terutama dimasa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan, ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersifat proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional, yang mencakup seluruh dari segi kehidupan.

Menurut Solihin (2002; 111) pembangunan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintahan wajib memberikan bimbingan pengarahannya bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong masyarakat pada setiap pembangunan yang di inginkan.

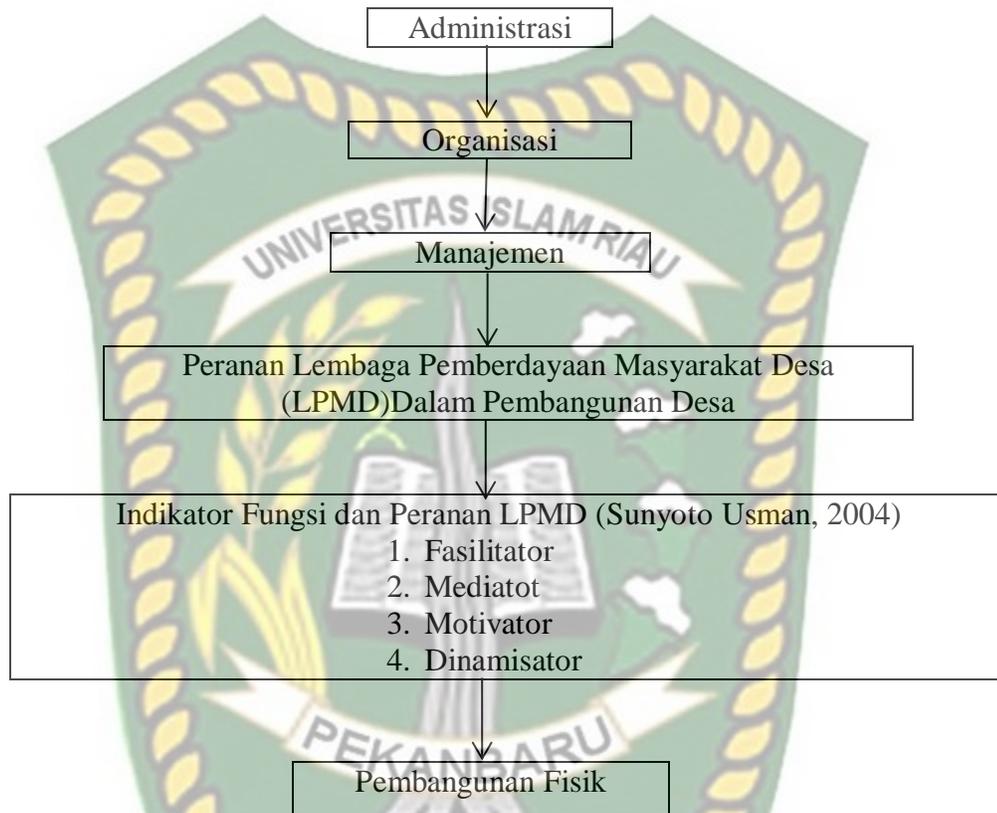
Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk memengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (*equity*), perhatian yang berat kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang manfaar tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (Ketaren, 2008: 37).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip kekeluargaan agar kebutuhan dan keinginann masyarakat tidak terabaikan. Menurut Wibawa (200;53) mengatakan partisipasi sebagai sikap untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan dan mengawasi suatu aktivitas. Usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dapat dikembangkan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar mesyarakat Desa dan strategi kelompok sasaran pembangunan Desa.

## B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut :

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

### C. Konsep operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Peneliti mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti, adapun konsep operasional tersebut antara lain :

- a) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara bedaya guna dan berhasil guna.
- b) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.
- c) Konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

- d) Peranan merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suaru perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan.
- e) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang diberikan fasilitas oleh pemerintah desa dengan melalui musyawarah dan mufakat secara bersama.
- f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki urgensi tugas dan fungsi dalam pembangunan.
- g) Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).
- h) Pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat, dan harga diri.
- i) Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan atau yang dituju telah tercapai dengan baik pada organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- j) Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- k) Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat di distribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- l) Fasiliator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalan melakukan rencan-rencana pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.
- m) Mediator adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Kecamatan terpadu kepada semua elemen masyarakat.
- n) Motivator adalah sebagai ujung tombak dan pion pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat.
- o) Dinamisator adalah mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD yang bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili.

#### D. Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2013:212)	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	1. Fasilitator	a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan b. Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program pembangunan
		2. Mediator	a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan
		3. Motivator	a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun b. Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat
		4. Dinamisator	a. LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan b. LPMD melakukan evaluasi pada program pembangunan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif dengan metode penelitian survey deskriptif, yaitu suatu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. karena penelitian bermaksud memeberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek pnelitian, sebingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kualitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dapat mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskann bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Begkalis.

## B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.. Adapun memilih Lokasi penelitian ini dikarenakan agar mengetahui bagaimana peranan dari LPMD Desa Muara Basung dan penulis menemukan masalah dalam Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Muara Basung yang belum berjalan dengan baik.

## C. Informan dan Key Informan Penelitian

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informasi adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Menurut Hendarso dalam Suyanto (2005:171-172). Adapun Key informan penelitian ini adalah Ketua LPMD, informan utama yaitu Wakil Ketua LPMD, Kepala Desa Muara Basung Kecamatan pinggir, Sekretaris Desa, struktur LPMD, Tokoh Masyarakat dan informan tambahan ialah Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu memilih beberapa informan yang sekiranya cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan

pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang berasal dari pengamatan langsung/wawancara dan observasi. Data primer ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui mengenai informan, yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan pada informan dalam penelitian untuk mengetahui peranan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) dalam

pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapngan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondidi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

###### a. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibu kotanya Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Provinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sumgai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Provinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triliun. Provinsi riau menjadi salah satu provinsi andalan untuk pemasukan kas negara. Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbangkan sekitar 50% produksi nasional. Bahkan riau termasuk tiga provinsi tekaya di Indonesia dengan pendapatan 3,7 triliun, di bawah Jawa Barat (5,2 triliun) dan Jawa Timut (4,3 triliun).

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah

ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangan bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buntan yang kemudiia disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaan meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejah, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung. Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut.

Datuk Laksamana Raja Di Laut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara islam. Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibu kota Keresidenan Sumatra Timur. Namun demikian, Belanda kemudian

memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sementara itu, perjuangan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

#### **b. Gambaran umum Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara  $2^{\circ}30$  Lintang Utara (LU),  $-0^{\circ}17$  Lintang Utara atau  $100^{\circ}52$  Bujur Timur (BT),  $-102^{\circ}52$  Bujur Timur (BT),  $-102^{\circ}$  Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Bengkalis adalah  $30.646.83 \text{ km}^2$ , meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah pulau Sumatera seperti Duri, Dumai, Jarak antara Duri - Bengkalis 106 kilometer. Dumai – Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (*ferry*) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan,

hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari.

Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dari jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sednagkan pada saat ini semangkin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berloma-lomba mencari sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak Kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibartkan sebuah piring. Pada bagian ssinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnta lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semangkin lama semangkin berkurang.

Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 kecamatan 19 kelurahan 136., selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan kecamatan dan ibu kota kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.1 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Mandau	Duri
2	Pinggir	Pinggir
3	Bukit Batu	Sungai Pakning
4	Siak Kecil	Lubuk Muda
5	Rupat	Batu Panjang
6	Rupat Utara	Tanjung Medang
7	Bengkalis	Bengkalis
8	Bantan	Selat Baru
9	Bathin Solapan	Sebangur
10	Bandar Laksamana	Tenggayun
11	Talang Mandau	Beringin

Sumber : Kantor Desa Muara Basung 2021

Adapun luas wilayah Kabupaten Bengkalis Luas Wilayah Kabuapten Bengkalis 7.773,93 km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lauta. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disampig pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabbupaten Bengkalis. lebih jelasnya diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2021**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Mandau	18.00	149.513	831
2	Pinggir	123534	58944	44
3	Bukit Batu	131.578	20287	42
4	Siak Kecil	74.221	23996	32
5	Rupat	89.635	31.943	36
6	Rupat Utara	62.800	12.441	20
7	Bengkalis	53.500	82.303	160
8	Bantan	49.500	42.349	100
9	Bathin Solapan	75.747	86.660	114
10	Bandar Laksamana	65.598	14.221	22
11	Talang Muandau	112.100	21.487	18

Sumber : Kantor Desa Muara Basung 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Mandau yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 149.513, sedangkan Rupat Utara merupakan kecamatan yang penduduknya paling kecil yaitu 12.441.

### c. Sosial Budaya

Kota Bengkalis sebagai Kota Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai sukubangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang dan Batak di samping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas. Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisional cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islam. sehubungan dengan itu dalam filsafah Melayu disebutkan bahwa “Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu”.

### 2. Keadaan Geografi Kecamatan Pinggir

Pinggir adalah ibu kota Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Yang merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di pulau Sumatera yang memiliki letak wilayahnya adalah 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17” Lintang Utara dan 100°56;10 Bujur Timur s/d 101°43;26” Bujur Timur. Dengan luas wilayah 2503 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 82,247 jiwa. Sesuai dengan luas wilayah Kecamatan Pinggir terbatas dengan :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Mandau & Bukit Batu
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Siak
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

**a. Pemerintahan**

Kecamatan Pinggir dipimpin oleh seorang Camat yaitu : Bapak Azuar secara keseluruhan Kecamatan Pinggir terdiri dari tiga belas desa/kelurahan yang status hukumnya sudah terdiri dari sebelas desa yaitu : Desa Pinggir, Semunai, Muara Basung, Desa Tenganau, Balai Pungut, Beringin, Serai Wangi, Melibur, Kuala Penaso, Tasik Serai Timur dan 2 kelurahan yaitu : Kelurahan Titian Antui dan Kelurahan Balai Raja. Partisipasi perempuan dan kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di kecamatan Pinggir masih rendah, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 21 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 118 orang, sedangkan 97 perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Pinggir terdiri dari 346 Rukun Tetangga (RT) dan 97 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Desa Pinggir sebanyak 68 RT dan Kelurahan Titian Antui sebanyak 56 RT.

### 3. Visi Dan Misi

#### 1. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Muara Basung dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka Visi Desa Muara Basung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“MUARA BASUNG SEHATI”

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sejahtera, yaitu :
  - a. Meningkatkan penghasilan warga
  - b. Melancarkan roda perekonomian
  - c. Menciptakan lapangan kerja
2. Harmonis, yaitu :
  - a. Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan
  - b. Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih
  - c. Member penyuluhan tentang bahaya narkoba
3. Tertib, yaitu :
  - a. Melestarikan tradisi gotong-royong
  - b. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan
  - c. Menciptakan masyarakat yang aman dan damai
  - d. Menggunakan dana dari pemerintahan secara efektif dan efisien

## 2. Misi

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat SEHATI melalui Peningkatan Usaha Pertanian tersebut diatas, Desa Muara Basung telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dari berdaya saing berbasis potensi lokal.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
4. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan tentang berwirausaha.
5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil pertanian.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### **B. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

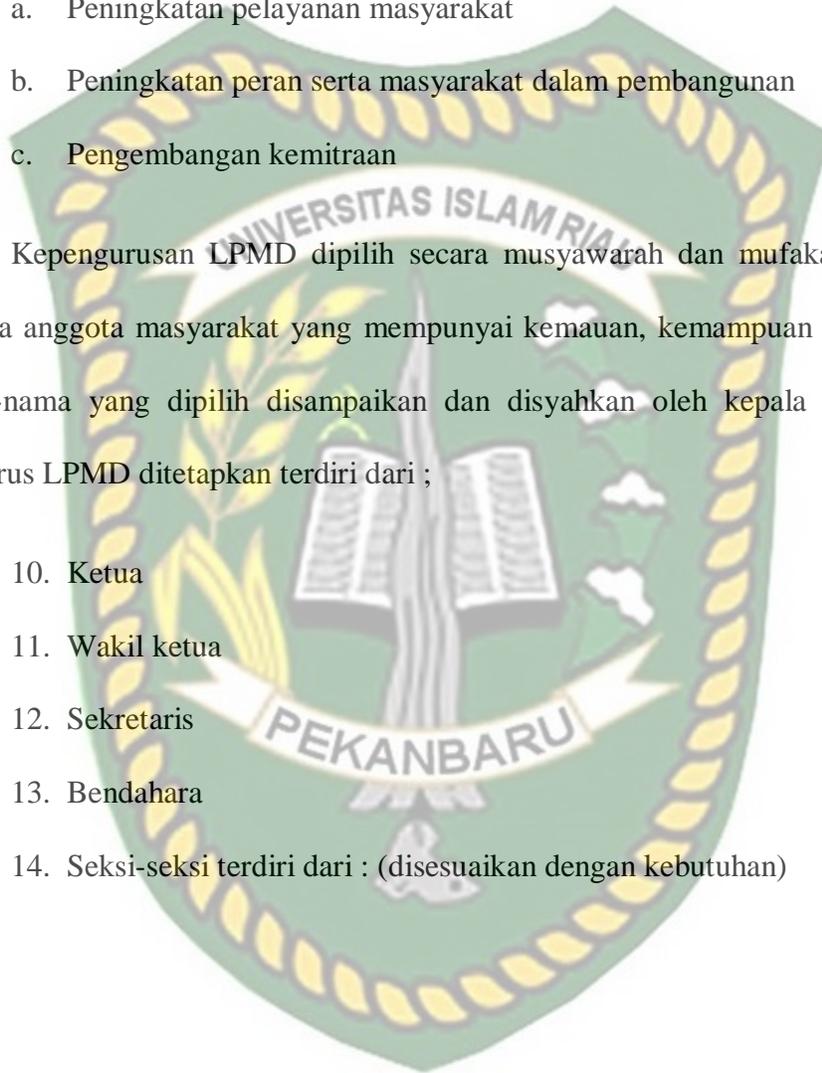
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kegiatan LPMD di semua tingkatan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi,

dan pemerintah daerah. Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi :

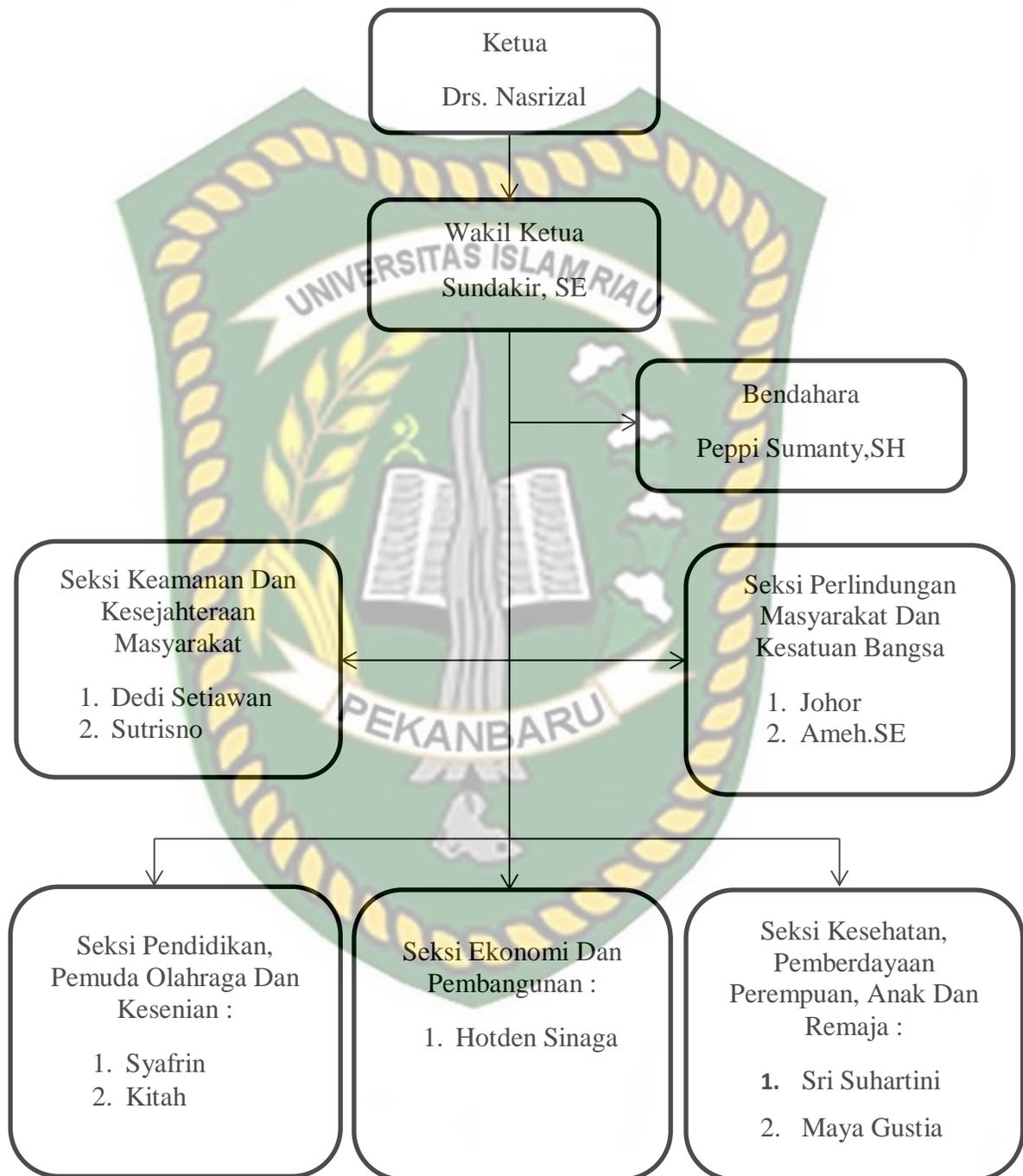
- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan

Kepengurusan LPMD dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh kepala desa. Susunan Pengurus LPMD ditetapkan terdiri dari ;

10. Ketua
11. Wakil ketua
12. Sekretaris
13. Bendahara
14. Seksi-seksi terdiri dari : (d disesuaikan dengan kebutuhan)



**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi LPMD Desa Muara Basung**



*Sumber LPMD 2021*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis ini akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimanakan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: Pertama, peneliti diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis seperti Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) LPMD di Desa Muara Basung dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan sejumlah wawancara dengan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan dan key informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data-data sekunder

didapatkan dari studi kepustakaan dan karya-karya ilmiah yang ada serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Muara Basung Kecamatan Pinggir, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah dengan menggunakan masing-masing indikatornya. Dan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan subjek penelitian yang terdiri dari beberapa kelompok informan dan key informan.

#### **A. Identitas Responden**

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan identitas informan dalam penelitian ini yaitu seorang yang memeberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Identitas informan dan key informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan secara langsung wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi dalam sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan identitas informan penelitian. Agar sebuah penelitian dan pembacanya merasa yakin bahwa penelitian inia dalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan dari adanya keterangan dibawah ini :

**Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Nasrizal	Ketua LPMD	Key Informan
2.	Akhyar Mukmin S.E.	Kepada Desa	Informan
3.	Sukirno	Sekdes	Informan
4.	Sundakir, S.E.	Wakil Ketua LPMD	Informan
5.	Hotden Sinaga	Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	Informan
6.	Suwandi	Tokoh Masyarakat	Informan
7.	Eko Darmawan	Tokoh Pemuda	Informan

Sumber : Data olahan Penulis 2021

### 1. Jenis Kelamin Responden

Untuk melengkapi data penelitian, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Olahan Penulis 2021

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah responden penelitian pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di

Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis menurut jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang. Hendaknya dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terjadi deskriminasi dan dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 7.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan usia.

**Tabel V.3 : Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Usia**

No	Umur	Jumlah
1.	21-30	1
2.	31-40	3
3.	41-50	2
4.	>51	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber : Olahan Penulis 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang berada pada usia 21-30 tahun berjumlah 1 orang responden, dan responden yang berusia 31-40 berjumlah 3 orang, responden yang berusia 41-50 berjumlah 2 orang dan selanjutnya responden yang berusia lebih >51 berjumlah 1 orang responden.

Berdasarkan uraian dapat dilihat bahwa responden penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berusia 21-30 tahun berjumlah 1 orang responden, dan responden yang berusia 31-40 berjumlah 3 orang, responden yang berusia 41-50 berjumlah 2 orang dan selanjutnya responden yang berusia lebih >51 berjumlah 1 orang responden.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden tingkat pendidikan.

**Tabel V.4 : Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SLTP	1
2.	SLTA	3
3.	Strata Satu (S1)	3
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber : Olahan Penulis 2021*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang, yang tingkat pendidikan SLTA berjumlah 3 orang dan yang tingkat pendidikan SLTP berjumlah 1 orang.

## **B. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator**

Peranan LPMD sebagai fasilitator di Desa adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMD selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat Desa di Muara Basung. Peranan LPMD di Desa Muara Basung memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana-rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar Desa. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Muara Basung. Agar dapat melihat peranan LPMD sebagai fasilitator di Desa Muara Basung, ada beberapa sub indikator yang dikaji didalamnya yaitu :

#### **a. Masyarakat Ikut dalam Merencanakan Pembangunan**

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa/kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa/kelurahan

untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Masyarakat diboleh untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam musrembang tingkat desa/kelurahan dan seterusnya.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang masyarakat ikut merencanakan pembangunan, maka penulis mengajukan wawancara kepada semua informan tentang perencanaan pembangunan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang akan dilaksanakan di Desa Muara Basung. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan sebagai berikut :

*“Pernah, untuk tentang perencanaan pembangunan melalui LPMD sebenarnya tidak begitu rutin dilaksanakan, tapi saya selaku masyarakat di desa ini, saya wajib untuk menghadiri musyawarah LPMD tersebut”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Pernah, karena saya adalah salah satu masyarakat yang ikut berperan dalam kegiatan LPMD terutama pembangunan”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Tentu pernah, karena saya adalah Kepala Desa di Desa ini, saya haruslah mengikuti rapat yang akan di adakan terutama dalam hal pembangunan karena itu juga merupakan tanggung jawab saya”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Pernah, karena sebelum program itu turun di Desa yang biasanya harus diajukan dari tingkat bawah dulu dengan diadakan Musrembang TK. Desa dan seterusnya”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada 01 tanggal Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku LPMD di Desa Muara Basung. Kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Sudah pasti pernah, karena saya juga merupakan salah satu penanggung jawab terhadap pembangunan yang akan dilakukan”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E. pada tanggal Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Pernah, tapi tidak rutin, dan saya juga pernah beberapa kali menghadiri undangan musyawarah tersebut”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).*

Untuk memperkuat data berikut wawancara secara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD Muara Basung) yaitu ketua LPMD. Adapun jawaban yang diberikan :

*“Partisipasi masyarakat sangat kurang dalam menjalankan program LPMD karena kurang kesadaran masing-masing individu, jaman sekarang rasa kebersamaan dan gotong royong sudah sangat berkurang, hal ini dikarenakan*

*masyarakat menganggap aparat atau lembaga sudah digaji Pemerintah dan mereka menganggap itu sudah menjadi tugas mereka”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator melalui LPMD Desa Muara Basung belum maksimal ataupun masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran merencanakan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat dari masyarakat itu sendiri.

b. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik ditingkat desa maupun kelurahan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindaklanjuti melalui musyawarah prioritas di tingkat kecamatan pinggir.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang dilakukan informan dalam menentukan prioritas dalam pembangunan. Adapun jawaban diperoleh dari semua informan sebagai berikut :

*“Kalau berbicara tentang Prioritas, tentunya yang paling menjadi masalah adalah masyarakatnya sendiri, pasti yang sangat dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“LPMD selalu mengikut sertakan masyarakat untuk dapat menyuarakan pendapat mereka tentang prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipannya :

*“Kalau persoalan penentuan prioritas pembangunan pemerintah Desa juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi masyarakat tersebutlah yang dapat menentukan mana pembangunan yang paling dibutuhkan dan penting untuk masyarakat Desa”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Demikian halnya penuturan dari Ibu Maya Gustia selaku Seksi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja sbb :

*“Yang saya lakukan dalam menentukan Prioritas dalam pembangunan Program di Desa Muara Basung hanya untuk kepentingan orang ramai atau masyarakat umum”. (Wawancara dengan Seksi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja Ibu Maya Gustia pada tanggal 01 Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipannya :

*“Biasanya dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat yang ada di desa”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku LPMD di Desa Muara Basung. Kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Penentuan Prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat dibutuhkan oleh masyarakat, yang di Prioritaskan untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah di programkan Pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal 01 Desember 2021).*

Kemudian dilakukan pula oleh jawaban yang disampaikan oleh salah satu seorang tokoh pemuda yang aktif berpartisipasi dalam LPMD di Desa Muara Basung yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Prioritas dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Musrebang tingkat desa dilakukan setahun sekali”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal 01 Desember 2021).*

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka diberikan wawancara langsung kepada Key informan (Fasilitator LPMD, Ketua LPMD Desa Muara Basung). Apakah program LPMD ini dibutuhkan atau tidak di Desa Muara Basung jawaban yang diperoleh yaitu :

*“Sebenarnya sangat dibutuhkan, hanya saja terkadang masyarakat no comment dengan program LPMD mereka menganggap LPMD tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya desa yang berbuat padahal sisamping desa LPMD ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh Pemerintah”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maka, penulis mencoba menyimpulkan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator dengan masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program adalah kurang maksimal atau masih rendah, hal ini dapat ditulis dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Jelas, jika hanya struktur-struktur desa yang menyampaikan usulan program, akan ada yang membawa kepentingan masing-masing desa. Jadi akan lebih baik jika LPMD sebagai fasilitator juga melakukan observasi terjun langsung kepada masyarakat untuk melihat dan menentukan prioritas usulan program apa yang akan dilaksanakan. Adapun sebagian kecil masyarakat yang hadir juga tidak menunjukkan respon yang aktif. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua LPMD bahwa penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Dan masyarakat beranggapan LPMD tidak bisa berbuat apa-apa.

## **2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Mediator**

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD Muara Basung mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga dan juga melalui bentuk undangan rapat.

a. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan

LPMD merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas Peranan LPMD seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPMD. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui LPMD tidak mungkin bisa bergerak, hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari LPMD sendiri adalah untuk memandirikan dan memberdayakan masyarakat yang ada, baik itu di desa maupun di kelurahan. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang partisipasi masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan LPMD Muara Basung, penulis memberikan wawancara kepada semua informan. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informasi bervariasi sebagai berikut :

*“Tentunya saya pernah karena saya juga Kepala Desa disini, dan berdasarkan absen yang saya lihat, memang ada masyarakat yang datang. Akan tetapi tidak dari semua masyarakat yang hadir”. (Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipannya :

*“Ya pernah, yang diadakan LPMD yaitu rapat yang dibahas Program apa saja yang akan dilakukan di Desa Muara Basung, dan pengurus selalu memberikan undangan kepada masyarakat untuk menghadirinya”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Pernah, karena saya adalah salah satu masyarakat yang ikut berperan dalam kebiatan LPMD dan sekaligus adalah anggota dari bagian pembangunan struktur LPMD tersebut”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kuipan wawancara sebagai berikut :

*“Pernah, karena pemerintah desa biasanya juga di undang pada saat rapat diadakan”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).*

Dan untuk jawaban dari Wakil Ketua LPMD sbb :

*“Tentu saja saya selalu hadir dalam musyawarah yang dilaksanakan di desa Muara Basung, karena saya merupakan salah wakil dari Ketua LPMD Desa Muara Basung. Maka saya haruslah bertanggung jawab di setiap rapat yang diadakan”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Pemuda Desa Muara Basung sebagai berikut :

*“Iya pernah, disitulah kami bisa menyampaikan keluhan kami. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal 01 Desember 2021).*

Untuk memperkuat data diberikan secara langsung kepada Fasilitator LPMD (Key Informan) yaitu Ketua LPMD Desa Muara Basung apakah masyarakat pernah mengikuti setiap diadakannya rapat LPMD. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu :

*“Menurut saya pernah, masyarakat yang ikut dalam rapat ditingkat desa hanya mereka yang mewakili yang dalam musyawarah desa, yang duduk sebagai perwakilan beberapa mengusulkan kebutuhan di desa, seperti sarana dan prasarana yang belum ada di tempat mereka tinggal”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPMD untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peranan LPMD sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku lembaga yang ditunjuk pemerintah telah mengadakan rapat di Desa Muara Basung untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan-hambatan yang ada di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

b. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

Informasi pembangunan hal yang sangat penting bagi LPMD, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan bisa memberikan informasi mengenai berjalannya pembangunan dibuat oleh LPMD Desa Muara Basung. Adapun kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya informasi dari masyarakat. Baik menyampaikan melalui

rapat, maupun hanya melalui RT/RW menyampaikan informasi yang didapatkan dari masyarakat. Selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga memberikan informasi kepada LPMD Desa Muara Basung. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan bervariasi sebagai berikut :

*“Kami sering memberikan informasi kepada masyarakat, contohnya untuk membentuk organisasi atau kelompok karena bantuan pemerintah harus berkelompok”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

*“LPMD biasanya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam rapat yang akan mereka adakan, disitulah masyarakat menyampaikan pendapatnya tentang pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal Desember 2021).*

Penulis juga meminta pertanyaan dari Kepala Desa Muara Basung, kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Dengan musyawarah lah biasanya pemerintah desa bisa membagikan informasi kepada masyarakat dan juga bisa mendapatkan informasi pembangunan dari masyarakat”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Biasanya dengan cara melakukan musyawarah”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).*

Keterangan tambahan juga diperoleh dari pelaku LPMD Muara Basung yaitu

Bapak Sundakir S.E. Adapun kutipan dari wawancaranya yaitu :

*“Ya seperti dikatakan, melalui musyawarah itulah kami bisa membagi informasi dan mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat, akan tetapi informasi yang saya berikan belum tentu sama dengan yang lain. Jadi semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin banyak kami bisa mendapatkan informasi. Jadi masyarakat juga lah yang menentukan”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Keterangan tambahan kami peroleh pelaku LPMD lainnya. Adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Ya, tetapi karena keterbatasan LPMD, informasi yang diterima oleh masyarakat pun hanyalah sekedar informasi, tetapi tidak berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).*

Hal senada diberikan oleh Tokoh Pemuda Desa Muara Basung yaitu :

*“Tentunya, jika ada kesempatan pasti saya menyampaikan informasi yang dapat kami sampaikan kepada LPMD tergantung LPMD menindak lanjutinya”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal 01 Desember 2021).*

Kemudian diperkuat pula keterangan yang diberikan oleh Key Informan selaku Fasilitator LPMD. Hambatan dalam mensosialisasikan program LPMD dan apakah masyarakat juga memberikan pendapatnya, Jawaban yang diperoleh :

*“Kurangnya pengetahuan masyarakat LPMD sangat Kurang, sumber daya masyarakat desa Muara Basung masih rendah dan kurang terorganisasinya masyarakat baik secara organisasi, dan untuk informasi dari masyarakat mungkin kami hanya bisa dapat dari desa masing-masing”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program, maka tidak mendapatkan informasi LPMD. Hal ini mengindikasikan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mediator sudah berjalan tetapi belum menyeluruh ke masyarakatan banyak, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya orang-orang yang aktif di desa saja dan pihak-pihak yang peduli dengan pembangunan yang dibuat oleh LPMD termasuk juga kurangnya sosialisasi bagi masyarakat Desa Muara Basung.

### **3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Motivator**

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para moivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang adadi Desa, bahkan ditingkat kecamatan maupun kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

#### **a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan Yang Sudah Dibangun**

Pembangunan di Desa akan terwujud apabila kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas LPMD sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang masih rendah tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dalam membangun serta mensukseskan pembangunan yang telah dibuat oleh LPMD, berikut hasil wawancara dengan semua informan dan mempunyai persamaan, yaitu :

*“Iya, contohnya perbaikan jalan yang berlubang atau rusak dan memanfaatkan gedung sebagna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan warga sekitarnya”. (Wawanacara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Sudah pastinya masyarakat setempat memanfaatkan pembangunan yang ada begitu pula dengan saya sendiri”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal Desember 2021).*

Jawaban dari informan lain juga yaitu :

*“Sudah cukup memanfaatkan pembangunan yang ada, terutama untuk gedung serbaguna. Pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warga”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku LPMD di Desa Muara Basung. Kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Sudah pastinya saya juga memanfaatkan pembangunan yang ada terutama saat akan mengadakan acara tentunya kami menggunakan gedung serbaguna*

yang telah di bangun, perpustakaan, jalan dan banyak lagi pembangunan yang lainnya”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E. pada tanggal Desember 2021).

Jawaban dari informan lain juga yaitu :

“Menurut saya cukup dimanfaatkan contohnya perbaikan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Seperti istri saya juga, sebagai mana ibu-ibu juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari bidang Pemberdayaan Perempuan. Dan saya melihat itu sangat bermanfaat bagi istri saya yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kuipan wawancara sebagai berikut :

“Kalau menurut saya cukup dimanfaatkan karena saya juga menggunakan jalan, gedung serbaguna dan masih banyak lagi”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).

Untuk memperkuat data dengan permasalahan diatas diberikan wawancara langsung kepada Fasilitator LPMD selaku Key Informan, apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang dibangun oleh LPMD desa Muara Basung. Adapun jawaban yang diperoleh :

“Menurut penilaian saya masyarakat sudah maksimal memanfaatkan pembangunan, mayoritas prasarana sosial dasar yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat Muara Basung”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).

Hal ini dapat memberi gambaran bahwa warga setempat dapat memanfaatkan bangunan telah dibuat. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan dapat disimpulkan bahwa

masyarakat sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh LPMD Desa Muara Basung.

b. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan Yang Sudah Dibuat

Merawat pembangunan yang ada di Desa merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada maupun pembangunan yang masih dalam proses. Untuk memperoleh data maka wawancara kepada informan. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan hampir sama.

Partisipasi masyarakat didalam pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakat lah yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Al ini diungkapkan oleh masyarakat, berikut kutipan wawancara nya :

*“Tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri, saya berharap masyarakat bisa lebih untuk dapat menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Yang dapat saya lihat ada masyarakat yang mau menjaga dan tentunya juga ada yang berlaku cuek dan acuh”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Selanjutnya hal senada yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Bapak Suwandi yang menjelaskan bahwa :

*“Iya mau, tetapi hanya sebagian saja karena rasa memiliki tersebut kurang, mereka berpikir jika nanti fasilitas yang sudah disediakan rusak, toh Pemerintah bantu lagi mereka tidak merasa rugi karena mereka anggap*

*bukan uang dari mereka”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).*

Selanjutnya dengan hal senada yang diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Desa

Muara Basung yang menjelaskan bahwa :

*“Kurang, masyarakat desa kurang atau sebagian besar hanya memanfaatkan dan urusan pemeliharaan diserahkan kepada pemerintah”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kuipan wawancara sebagai berikut :

*“Masyarakat belum begitu berperan sekali pada perawan pembangunan yang ada, masyarakat acuh sekali pada perawatan pembangunan yang ada karena menurut mereka pemerintah desa lah yang wajib merawat pembangunan yang ada”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).*

Kepala Desa Muara Basung juga mengutarakan pendapatnya, berikut kutipan wawancaranya :

*“itulah yang menjadi kendala terbesar dilingkungan masyarakat kami, bangunan yang sudah dibangun sudah difasilitasi jangankan mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga yang baik, malah sebagian besar mereka mengabaikan program atau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Untuk memperkuat data maka diberikan wawancara langsung Key Informan (Fasilitator LPMD). Apakah masyarakat desa Muara Basung mau merawat pembangunan yang telah dibuat oleh LPMD desa Muara Basung. Adapun jawaban yang diperoleh :

*“Ya, memang harus seperti itu maksudnya setelah selesai pembangunan dan didalam musyawarah desa serah terima masyarakat membentuk satu tim yang dinamakan dengan Tim Pemantau atau dikenal dengan TP3 (Tim Pemelihara, Pelestarian, Pembangunan)”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat Desa Muara Basung dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat merawat keadaan fisik yang telah dibuat.

#### **4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator**

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. LPMD jeli dan bijaksana dalam mementau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan dimasing-masing wilayah dia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat terutama merupakan tugas.

- a. LPMD Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Program Pembangunan

Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi. Dengan keikutsertaan

masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan LPMD. Kerjasama antara masyarakat dan pihak LPMD yang sangat baik mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Desa Muara Basung. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah.

Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah difasilitasi oleh LPMD. Untuk mengetahui seberapa jauh LPMD melaksanakan fungsinya peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

*“Menurut pribadi saya, selama ada LPMD disini tidak ada yang melakukan pengecekan secara berkala, baik bangunan yang telah dibangun yang telah dibangun, mereka anggota LPMD melakukan pengecekan disaat awal, berjalannya kegiatan dan berakhirnya kegiatan dan setelah selesai proses itu semua sama sekali tidak ada”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Pemuda Desa Muara Basung sebagai berikut :

*“Sebagian besar fisik yang telah dibangun didesa kami, ya begitu adanya berjalan semestinya. Sebagai Tokoh Pemuda Desa Muara Basung saya belu*

*pernah melihat Ketua LPMD melakukan secara langsung dilapangan jika pembangunan tersebut sudah selesai dibangun”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Bapak Eko Darmawan pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kuipan wawancara sebagai berikut :

*“Kalau soal pemantauan setau saya tidak ada dilakukan karena begitu selesai pembangunan, bangunan tersebut sudah menjadi fasilitas masyarakat dimana masyarakat haruslah bisa merawat fasilitas yang telah diberikan”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).*

Hal senada juga diutarakan oleh informan lain yaitu :

*“Yang saya ketahui selama ini bahwa LPMD hanya melakukan pengecekan di awal saja dan tidak melakukan pengecekan secara berkala”. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Memang anggota yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut tidak ada yang melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang sudah selesai, karena dari kami sendiri juga tidak aturan yang mewajibkan mereka untuk memantau kegiatan tersebut dan semua tergantung masyarakatnya saja, kalau masyarakat puas berarti berjalan baik dan apabila masyarakat tidak puas ya mohon bantuan dari masyarakat untuk dapat memberitahukan kekurangannya”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E pada tanggal Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Pembangunan di Desa Muara basung cukup berjalan, tetapi saya belum pernah melihat adanya anggota LPMD yang memantau atau melakukan*

*pengawasan terhadap pembangunan yang telah selesai, mereka hanya datang di awal saja selebihnya tidak ada”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal Desember 2021).*

Untuk memperoleh data yang lebih kuat maka penulis memberikan pertanyaan langsung kepada Key Informan ( Fasilitator LPMD) berkaitan dengan apakah ada pemantauan dari anggota LPMD di Desa Muara Basung. Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut :

*“Nah ini masalah nya, selama ini memang tidak pernah ada pemantauan yang dilakukan oleh Fasilitator, sebab disini juga tidak ada hukuman yang berat atau tidak ada aturan yang di program kan, terlepas itu bagus atau tidaknya tergantung masyarakat yang menanggapi”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan dapat disimplkan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan fasilitator desa yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sidah selesai maka masyarakat yang berhak menaggapi bagaimana baik atau tidaknya sebab masyarakat langsung memanfaatkan hasil program tersebut.

#### b. LPMD Desa Melakukan Evaluasi Pada Program Pembangunan

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan LPMD meruapak peran serta masyarakat dalam

memelihat hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak LPMD sendiri maupun pihak masyarakat yang ada di Desa Muara Basung. Penulis memberikan pertanyaan kepada informan dan Key Informan, apakah selama berjalannya program LPMD di Desa Muara Basung ada evaluasi terhadap pembangunan.

*“Baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang menentukan, dari pihak LPMD tidak ada melakukan pengecekan kembali seperti diutarakan pertanyaan tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Basung Bapak Akhyar Mukmin, S.E. pada tanggal 01 Desember 2021).*

Hal senada juga diutarakan oleh informan lain yaitu :

*“Setau saya, selama saya tinggal di daerah ini evaluasi yang dilakukan, apa yang diperbuat itulah yang masyarakat terima, sebab masyarakat disini kurang mengambil tahu tentang adanya kegiatan daerahnya sendiri”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Basung Bapak Suwandi pada tanggal 01 Desember 2021).*

Selanjutnya penulis juga meminta pertanyaan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Selama saya tinggal disini tidak ada evaluasi atau pun pengecekan kembali”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Muara Basung Saudara Eko Darmawan pada tanggal Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kuipan wawancara sebagai berikut :

*“Evaluasi yang dilakukan oleh tim LPMD mungkin tidak ada”. (Wawancara dengan Sekdes Desa Muara Basung Bapak Sukirno pada tanggal Desember 2021).*

Untuk memperkuat data dengan permasalahan diatas diberikan wawancara langsung kepada fasilitator LPMD selaku Key Informan, berapa lama pemantauan tersebut dilakukan. Adapun jawaban yang diperoleh sebagai berikut :

*“Jika tidak ada pemantauan sudah tentu tidak ada jangka waktu yang dilakukan di LPMD tersebut”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Evaluasi bisa dilakukan apabila masyarakat mampu memberikan opini mereka kepada kami agar kami mengetahui permasalahan yang terjadi, namaun masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota LPMD. Menurut mereka itu semua adalah pekerjaan dari anggota LPMD dan mereka tidak ingin mengambil pusing”. (Wawancara dengan Wakil Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Sundakir S.E pada tanggal Desember 2021).*

Berikut juga ada kutipan wawancara tentang peranan yang sudah dilakukan LPMD Muara Basung secara umum sampai saat ini oleh salah satu perwakilan dari Seksi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja Ibu Sri Suhartini. Berikut pernyataannya :

*“Sejauh pemantauan kami, untuk perbandingan desa, Desa Muara Basung sudah cukup menjalankan dengan baik, desa ini juga pernah dalam satu kali mendapatkan penghargaan dari salah satu Kecamatan dalam kegiatan yang mereka lakukan dengan membuat kebun dengan pemanfaatan perkarangan rumah masyarakat yang hasilnya sangat membantu masyarakat, tetapi untuk kinerja internal mereka sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya hanya melihat program apa yang mereka laksanakan. Dan beberapa program yang sudah dilaksanakan. (Wawancara dengan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Bapak Hotden Sinaga pada 10 tanggal Januari 2022).*

Dan penulis juga menambahkan pertanyaan baru terkait dengan masalah dan tantangan apa secara umum yang dihadapi LPMD di Desa Muara Basung. Pertanyaan ini saya tujukan langsung kepada informan. Pertanyaannya adalah, apa saja yang menjadi masalah dan tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan LPMD sampai saat ini? Jawabannya adalah sebagai berikut :

*“Sama seperti yang saya utarakan dipertanyaan sebelumnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat ini sebenarnya tidak dikatakan baik di desa ini. Kami butuh kesadaran masyarakat yang lebih lagi hal yang mendukung pertanyaan ini karena ada alasan juga, yaitu dengan hadirnya PNPM, itu sangat mempengaruhi. Masyarakat lebih banyak memberikan partisipasinya terhadap PNPM itu sendiri karena memang kegiatan lebih menguntungkan untuk masyarakat. Padahal LPMD inilah lembaga yang dibawah pengawasan pemerintah. Tetapi saya juga kecewa terhadap pemerintah terkait dengan dana yang diturunkan kepada kami. Kami terbatas melakukan kegiatan juga karena dana yang diturunkan tidak sesuai, jadi kami hanya bisa melakukan kegiatan secukupnya saja berbeda dengan yang dilakukan PNPM karena mereka juga memang didukung dengan keuangannya. Jadi terkadang tidak heran juga kalo kenyataanya masyarakat lebih condong ke kegiatan yang dilakukan PNPM itu. Jadi saya juga berharap pemerintah memperhatikan ini juga”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Muara Basung Bapak Drs. Nasrizal pada tanggal 01 Desember 2021).*

Dari kutipan wawancara diatas terlihat jelas bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai dinamisator tidak berjalan dengan baik. Tidak dijalankan sama sekali. Setelah terjadi pembangunan dan sampai selesai tidak dilakukan pengevaluasian oleh anggota atau ketua LPMD itu sendiri.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Basung**

Secara umum permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengikat satu sama lain, yaitu :faktor internal dan faktor eksternal.

#### **1. Faktor internal**

Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Faktor internal ini menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat yang ada di Desa Muara basung.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Faktor eksternal pada kendala LPMD adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh-kembangkan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh LPMD ini adalah kemampuan yang menggerakkan swadya gotong-royong masyarakat. Keterlibatan LPMD dalam menggerakkan swadya gotong-royong masyarakat dapat dilihat dan keterlibatan

dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Selain itu kemampuan LPMD dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan. Berbagai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Muara Basung, tidak pernah diadakan evaluasi sehingga diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan kegiatan serta ketepatan pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. LPMD juga kurang mampu memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik tenaga, materi, maupun pemikiran. Hal ini menyebabkan kurangnya capaian sasaran pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Keberadaan organisasi lokal seperti LPMD sangat diperlukam untuk menghindari ekses negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. LPMD juga merupakan lembaga otonomi di Desa yang diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan observasi terbatas yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa LPMD sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Muara Basung sudah memperlihatkan perannya sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan 4 indikator peranan lembaga pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari patisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing.
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPMD untuk masyarakat.

3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Desa Muara Basung dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik, bangunan yang telah dibuat.
4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Desa yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut. Dengan kata lain, tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LPMD.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan, peranan akan terwujud secara baik jika pemerintah, Fasilitator Desa dan masyarakat dapat bekerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan yang dijalankan. Jadi penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa peranan LPMD di Desa Muara Basung sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun respon dari masyarakat di Desa itu sendiri yang kurang menanggapi Program dari Pemerintah.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat Desa untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga LPMD tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan LPMD. Diharapkan kepada Fasilitator LPMD agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung didalam LPMD baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di Desa.
3. Diharapkan kepada pihak aparat Desa, pidak LPMD dan masyarakat untuk bekerjasama dalam hal merencanakan pembangunan, menentukan prioritas usulan program, keikutsertaan masyarakat dalam rapat yang diadakan LPMD, memanfaatkan dan merawat pembangunan yang ada, pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan dan terakhir

melakukan evaluasi program pembangunan yang sudah terealisasi sehingga terciptanya keberhasilan pembangunan yang ada di Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andry, Hendry dan Yussa, Tarmizi. 2015. *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhingan, 2007. *Ekonomi pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok, PT Raja Grafindo Persada
- Marbun, BN, 2006. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta.
- Ndraha, Tauziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Rauf, Rahyunir., Dan Munaf Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta, Zanafa Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2017. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Siagian H, 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Penerbit Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta, Kompas.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta, Prenada Media
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, Bumi Aksara
- Syafri, Wirwan, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Syani, Abdul, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung, Pustaka Jaya.

- Tenggoro, Damar Jati. 2020. *Buku Pintar Pengembangan Ekonomi Desa*. Jawa Tengah, Penerbit Literasi Desa Mandiri
- Thoha, Miftha. 2012. *Perilaku Organisasi “Konsep Dasar dan Aplikasinya”*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta, Gunung Agung.
- Utami, Ajeng D. 2020. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jawa Tengah, Literasi Desa Mandiri
- VO, Wisnu I. and Soimin, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan*. Jawa Timur, Intrans Publishing
- Wibawa, Samudra. 2000. *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty
- Wibowo. 2016. *Kepemimpinan Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada
- Widjaja, Prof. Drs. HAW, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta, Prenadamedia Group
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru Fisipol UIR
- Zulkifli., Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR
- Zulkifli. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing

### Dokumentasi

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulis*. Pekanbaru, Bhdan Penerbit FISIPOL UIR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang: *Desa*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang: *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang: *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

### **Jurnal dan Skripsi**

Rezki, Putri Mulda. “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Suatu Study Tentang Pembangunan Fisik Atas Swadaya Masyarakat Di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)*”. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, UIR. 2010

Lestari, Mega. “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, UIR. 2011.

Juliana. “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Tahun 2014*”. Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, UNMRAH. 2015.

Sumarni. Aan. *“Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 Di Kelurahan Bendungan Dan Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Provinsi Banten”*. USAT. 2018.

